

PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM KOTA MEDAN

Rahma Fahmadina Lubis¹, Nur Ahmadi Bi Rahmadi²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

dinarahma872@gmail.com, nurahmadi@uinsu.ac.id

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises are businesses operating in various business fields that play an important role in society, because they can encourage the rate of economic growth and employment in the region. The role of SMEs in improving the welfare of society can be seen from: Their position as major players in economic activities in various sectors, the largest providers of employment opportunities, important players in local business development and community empowerment and sources of innovation. The Regional Government in creating a good climate for MSMEs has not yet been fully realized as seen from the strategy and formulation of public policies that have not been in favor of MSMEs so that MSME actors are hampered in product marketing and financial constraints still limit decision making at the local level so that the Regional Government has not been able to provide capital and equipment assistance. -tools that can be used by MSME actors so that MSME actors seek their own capital and tools to survive. Apart from that, problems also come from MSMEs related to unprofessional management, this is due to the limited knowledge and skilled human resources possessed by MSMEs so that the government which has the authority and power in making policies should collaborate with the private sector to provide training to MSMEs so that they can survive, too. so that their business can develop in the future. The aim of carrying out this research is to determine the role of the Regional Government in empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the Minahasa Regency cooperative and SME services towards the independence of MSMEs in Minahasa. The research used is descriptive research, using a qualitative approach.

Keywords: Role of the Cooperative and SME Service, Empowerment of MSMEs

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Peran Dinas Koperasi dan UKM, Pemberdayaan UMKM

1. Pendahuluan

Pengaruh Globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien dan kompetitif. Hal

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan Terbesar di dunia dengan jumlah penduduk tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar diharapkan mampu mengimbangi pembangunan di berbagai sektor dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara. Namun data BPS menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 8.319.799 jiwa. Bahkan cadangan devisa Indonesia masih kalah dengan cadangan devisa luar negeri. Ini membuktikan pemerintah masih memiliki tugas yang begitu berat dalam mengetaskan proses pembangunan agar mencapai kesejahteraan masyarakat

Sejarah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang pernah melanda negeri ini sejak tahun 1997. Hingga tahun 2011 UMKM mampu memberikan andi besar pada penerimaan negara dengan menyumbang sebanyak 61,9% pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut: sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7% melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011)

2. Kajian Teoritis

Dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi titik sentral di dalamnya. Berdasarkan data Berita Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010), dari total tenaga kerja usaha besar dan usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 102,2 juta orang, sekitar 99,4 juta orang (97,225%) berada pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja. Data empiris menunjukkan bahwa dengan investasi terbatas, unit usaha ekonomi rakyat dapat menciptakan lebih banyak unit usaha dan jaga kesempatan kerja

Selain memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM juga memiliki peran dalam perekonomian nasional. Selama tahun 2010, kontribusi UMKM

berkisar 57% terhadap PDB. Kemudian, banyaknya unit usaha yang bisa diciptakan dengan investasi terbatas di usaha kecil mencerminkan juga banyaknya kesempatan kerja baru yang dapat diciptakannya jika unit usaha tersebut didorong untuk tumbuh dan berkembang

Data di atas menunjukkan bahwa usaha kecil dan mikro menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Fakta kinerja ini menunjukkan peran UMKM sebagai bagian terbesar dari seluruh unit usaha nasional yang merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran UMKM sebagai salah satu pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud bangunan ekonomi nasional.

3. Metodologi Penelitian

Alat analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif berbasis pengumpulan informasi, metode penelitian kualitatif ini adalah cara untuk menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan terkait “ Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM”. Penulis juga mengumpulkan dari berbagai literature terkait dengan kajian penulis ini berbagai sumber dan mengkaji serta merangkumnya untuk kemudian ditulis dalam artikel ini. Hasil dari berbagai telaah litelatur ini akan digunakan untuk mengetahui strategi manajemen perubahan dalam meningkatkan organisasi pada Perusahaan

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Peranan Dinas UKM

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan

Menurut Ade Komarudin (2014:1-2). Konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: pertama, didirikan untuk usaha yang tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha. Dilanjutkannya, berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa:

1. Usaha mikro adalah ekonomi yang kegiatan dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2.5.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Susilawati (2016:8) Dalam bukunya Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, mengemukakan bahwa Definisi dan Kriteria dari UMKM sebagai berikut;

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) kriteria Usaha Mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Peran Fasilitatif

Dinas Koperasi dan UKM dalam menunjang produktifitas dan pemasaran hasil produksi hanya sebatas dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk ikut serta dalam memarkan hasil usaha. Dalam mempromosikan hasil produk melalui pameran-pameran yang diadakan pemerintah provinsi maupun oleh kabupaten. Walaupun dengan melakukan promosi pemerintah hanya sebatas memperkenalkan hasil produksi tanpa memberikan brosur- brosur lokasi dari sentra produksi. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memperkenalkan produk hasil olahan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun tidak semua produk yang dapat di bawa untuk di pameran, hanya beberapa produk yang sudah memiliki kemasan yang bagus yang bisa di pameran. Juga karena pameran diadakan setiap tahun demikian promosi yang hanya dalam bentuk pameran tidak akan terlalu berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dinas Koperasi dan UKM belum dapat menunjang pelaku usaha dengan memberikan fasilitas dan pendanaan akan tetapi pemberian fasilitas berupa bantuan alat usaha dan fasilitas yang dapat menunjang lainnya dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara dari hasil wawancara peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa promosi yang dilakukan dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pameran tidak berdampak secara langsung terhadap pemasukan pelaku usaha.

Lain halnya dengan pemberian motivasi, pelatihan dan pemberian semangat melalui seminar terhadap pelaku usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dianggap

dapat berpengaruh bagi pelaku usaha. Pemberian semangat dalam bentuk seminar dan penyuluhan kewirausahaan dianggap sebagai cara yang baik dalam rangka menunjang semangat dan jiwa entrepreneurship, dalam pemberian motivasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pihak swasta maupun dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pengusaha baru setiap tahunnya.

Peran Edukasional

Peran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam menambah pengetahuan bagi pelaku usaha dan memberikan pelatihan keterampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan didapati peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi juga swasta dalam meningkatkan hasil usaha dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan, seminar juga pelatihan-pelatihan di tiap sektor pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar nantinya bisa mandiri dan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Walaupun dari hasil wawancara dengan pelaku usaha tidak semua pelaku usaha yang dapat terjangkau, ada beberapa usaha yang tidak dilakukan penyuluhan kewirausahaan dikarenakan usaha, mikro kecil dan menengah di Kabupaten Minahasa ada banyak dan tersebar di 21 kecamatan di kota Medan, juga karena keterbatasan anggaran dari dinas yang minim. Sementara dalam pemberian. pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan dalam Pemerintah Provinsi mendampingi UKM maupun koperasi, yaitu dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan juga pendamping UKM dalam memberikan informasi serta pelatihan keterampilan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah

Peran Representatif

Dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman lunak dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pemberdayaan pelaku usaha dan juga bekerjasama dengan koperasi- koperasi di Kabupaten Minahasa dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Agar pemberian dana tepat sasaran

Pemerintah Kabuapten mengambil data pelaku usaha serta lokasi tempat usaha di Dinas Koperasi dan UKM agar nantinya dapat dilakukan pemberdayaan. Pada tahun 2006 Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Project Canadian International Development Agency Private Enterprise Participation (PEP) memberikan bantuan pendanaan juga pelatihan kewirausahaan kepada pengerajin keramik di desa Pulutan Kecamatan Remboken. Pemerintah terutama Dinas Koperasi dan UKM selaku lembaga pemerintah yang kredibel dan evekif dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas, daya saing dan kemandirian, dalam hal memperkenalkan hasil produksi pelaku usaha tidak memanfaatkan media masa, pemerintah dalam meperkenalkan hasil produksi hanya lewat pameran-pameran yang mana tidak berdampak secara langsung bagi pelaku usaha. Sementara peran representatif dari Dinas Koperasi dan UKM hanya memberikan data serta lokasi pelaku usaha kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten.

Peran Teknis

Berkaitan dengan keterampilan teknis Dinas Koperasi dan UKM selalu melakukan pelatihan keterampilan bagi ASN dalam menggunakan komputer, hal ini dilakukan karena Dinas Koperasi dan UKM dalam tugasnya melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja. Serta dalam melakukan pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM selalu membuat seminar pelatihan dan pengembangan pelaku usaha dalam rangka memajukan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi.
2. Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM.

3. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja.
4. Pemerintah bekerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UKM.
5. Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi : Sistemika. Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ali, F. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Huda, Ni'matull. 2012. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2016. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Bandung: Pustaka Pelajar
- Karimuddin. 2018. Pembinaan Dan Fasilitasi Legalitas IUMK. Jakarta: 27-28 Maret 2018. Slide 12.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Riawan Tjandra. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Surabaya: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama